

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ikhwanul Muslimin adalah kelompok islam sunni yang didirikan pada tahun 1928 di Ismailia, Mesir oleh Hassan al-Banna. Kelompok ini menyebar dengan cepat ke seluruh Mesir, Sudan, Suriah, Palestina, Lebanon, dan Afrika Utara. Dan mempunyai pengaruh besar dinegara-negara yang mereka tempati. Karena berbagai kejadian yang terjadi, Ikhwanul Muslimin ditetapkan menjadi kelompok terorisme oleh Amerika Serikat, dan serta diikuti oleh Arab Saudi dan UEA yang menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok terorisme. Dianggap sangat berbahaya bagi kesatuan negara di Timur Tengah, banyak tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang dicari dan dipenjarakan jika terbukti melakukan tindakan terorisme. Selain itu, negara-negara yang terbukti mendukung gerakan terorisme akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sejarah hubungan Ikhwanul Muslimin terhadap anggota GCC sangat bervariasi di antara enam anggotanya. Dipengaruhi oleh representasi politik, sosial dan teologis yang berbeda, serta agenda kebijakan luar negeri yang berbeda. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) menilai Ikhwanul Muslimin secara pandangan yang berbeda-beda. Beberapa monarki Teluk Arab memandang gerakan ini sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup mereka dan keamanan regional. Beberapa negara yang lain juga memiliki pandangan lain yaitu menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai sekutu politik yang berguna atau kelompok oposisi yang sah, dalam upaya menghadapi ancaman internal dan eksternal lainnya seperti perluasan pengaruh Iran / Syiah atau munculnya aktor islam Sunni yang lebih ekstrem. (Hedges & Cafiero, 2017)

Qatar merupakan negara terkecil kedua di GCC dengan populasi penduduk hanya 243.000 jiwa. Populasi penduduk Qatar hanya sebagian kecil dari total 31 juta populasi Arab Saudi atau 8 juta UEA. Qatar juga memiliki militer terkecil yaitu hanya 12.000 tentara, dibandingkan dengan Arab Saudi yang memiliki 227.000 tentara. Terlepas dari kesenjangan besar dalam populasi dan kekuatan militer ini, Qatar juga telah lama mengabaikan kekuatan tetangga-tetangganya yang lebih kuat mengenai posisi kebijakan luar negerinya yang pada beberapa masalah secara diametrik bertentangan dengan anggota GCC yang lain. (Habibi & Leir, 2017)

Kebijakan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin berbeda dengan anggota GCC yang lain. Qatar sangat berani dengan menunjukkan dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin. Apalagi setelah dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin selama masa Arab Spring yang membuat anggota-anggota GCC geram dengan kebijakan yang dilakukan Qatar. Qatar banyak mendukung kelompok oposisi, salah satunya mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Qatar mendukung kelompok oposisi Mesir yang melakukan pemberontakan dengan tujuan ingin menggulingkan kekuasaan presiden Hosni Mubarak. Karena kerputusannya dalam mendukung kelompok oposisi, hubungan Qatar dengan Arab Saudi dan UEA mulai tidak baik selama masa Arab Spring ini.

Qatar mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan negara-negara di GCC dalam kasus Arab Spring. Qatar adalah pendukung utama bagi kelompok oposisi dinegara-negara yang berdampak kasus Arab Spring, seperti Tunisia, Mesir, Yaman, Suriah, Bahrain dan sebagainya. Qatar mendanai kelompok-kelompok yang melakukan revolusi dinegaranya, termasuk Ikhwanul Muslimin. Qatar adalah pendukung utama Ikhwanul Muslimin. Berbeda halnya dengan Arab Saudi dan UEA yang mana mereka adalah kelompok yang tidak setuju dengan adanya revolusi ini. Bahkan Arab Saudi mengirimkan pasukan militernya untuk membantu melawan

kelompok oposisi yang mencoba menimbulkan kekacauan. Masalah perbedaan kebijakan inilah yang membuat hubungan antara Arab Saudi, UEA renggang dengan Qatar.

Keberanian Qatar untuk mengambil kebijakan yang berbeda dari negara-negara anggota GCC yang lain yakni karena sejarah panjang dirinya dengan Ikhwanul Muslimin. Banyak yang menganggap hubungan Ikhwanul Muslimin dan Qatar adalah realpolitik. Namun jika dilihat kebelakang hubungan antara keduanya sudah terjalin sejak lama, dan mempunyai sejarah panjang yang hanya dapat dirasakan oleh Ikhwanul Muslimin dan Qatar. Namun negara-negara tetangganya seperti Arab Saudi dan UEA tidak pernah memperdulikan alasan dibalik dukungan itu. Karena bagi Arab Saudi dan UEA, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan islam ekstrim, dan telah ditetapkan sebagai gerakan terorisme. Negara besar di GCC seperti Arab Saudi dan UEA tidak mendukung kebijakan Qatar tersebut, dan diikuti oleh negara-negara GCC yang lain. Dukungan Qatar tersebut telah keluar dari peraturan yang telah ditetapkan oleh GCC dan dianggap melanggar perjanjian yang ada.

Setelah periode awal pada Januari 2011 pada masa Arab Spring, para pemimpin Qatar mengakui kontur yang berkembang dari pergolakan politik yang mengalir di seluruh Afrika Utara dan Timur Tengah yang mana kebijakan yang disesuaikan secara pragmatis. Qatar memiliki posisi yang baik untuk mengambil peran yang berpotensi dan memiliki intervensi selama tahap awal pergolakan di wilayah yang berdampak oleh Arab Spring ini seperti Tunisia, Mesir, Suriah, Bahrain, dan Yaman . Keputusan pejabat Qatar untuk menerima arah perubahan adalah keputusan yang unik di antara negara-negara lain dikawasan itu, yang mana negara-negara lain menolak tekanan rakyat yang diakibatkan oleh kasus Arab Spring yang mereka lihat secara inheren sebagai ancaman. Kebijakan Qatar mencerminkan evaluasi yang cermat atas kepentingan negara dalam mengambil tindakan saat negara lain

mengalami kerusuhan. Qatar mengejar interaksi langsung dan tidak langsung di Libya dan Suriah dengan kedok mencari solusi permasalahan yang terjadi dan memobilisasi bantuan ekonomi di Tunisia dan Mesir. Namun, Qatar membatasi diri dengan bertindak hati-hati dengan tindakan GCC yang bertujuan untuk memulihkan politik pada masa Arab Spring. Tatanan pemerintah di Bahrain dan Yaman, mengakui pengaruh Arab Saudi yang lebih besar di negara-negara ini dan potensi ancaman pemberontakan yang sukses di Teluk bisa menimbulkan stabilitas di lingkungannya. (Ulrichsen, 2014)

Qatar menjadi pendukung kelompok oposisi pada masa Arab Spring salah satunya di Mesir. Qatar mendukung kelompok oposisi dan Ikhwanul Muslimin dalam upaya penggulingan presiden Mesir Hosni Mubarak. Qatar mendanai kelompok-kelompok oposisi dan Ikhwanul Muslimin untuk melakukan revolusi baru di Mesir. Sedangkan anggota GCC yang lain seperti Arab Saudi dan UEA mendukung pemerintahan Hosni Mubarak dan menolak penggulingan pemerintahan Hosni Mubarak. Arab Saudi dan UEA mengirimkan militernya ke Mesir untuk membantu pasukan keamanan Hosni Mubarak untuk mempertahankan pemerintahannya dan menjaga keamanan selama pemberontakan.

Di bawah pemerintahan Mubarak (1981-2011), Mesir sangat dekat dengan Arab Saudi. Maka dari itu Arab Saudi sangat menolak adanya revolusi di Mesir dan sepenuhnya mendukung pemerintahan Hosni Mubarak. Namun Qatar memiliki kebijakan yang berbeda, Qatar mendukung adanya perubahan revolusi di Mesir. Setelah Hosni Mubarak turun dari jabatannya sebagai presiden Mesir setelah kurang lebih menjabat selama 30 tahun. Selanjutnya digantikan oleh Mohamed Morsi yang merupakan anggota dari Ikhwanul Muslimin. Timbul kecurigaan bahwa Mesir yang saat itu dipimpin oleh Morsi akan melakukan perubahan geopolitik yang menjalin hubungan dengan Iran dan mulai menjauh dari

hubungannya dengan Arab Saudi. Ini yang menjadi faktor yang mendorong Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya (dengan pengecualian Qatar) untuk sepenuhnya mendukung penggulingan militer Mesir atas Morsi pada 3 Juli 2013. (Hedges & Cafiero, 2017)

Keputusan Qatar yang berbeda pendapat dengan anggota GCC yang lain menyebabkan krisis diplomatik Qatar yang dimulai pada tahun 2011 dan puncaknya terjadi pada 5 Juni 2017 ditandai dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Mereka juga memberikan warga Qatar waktu 14 hari untuk meninggalkan wilayah mereka dan melarang warga mereka sendiri berpergian atau tinggal di Qatar. Kemudian Mesir juga memutuskan hubungan diplomatik tetapi tidak memberlakukan pembatasan pada 180.000 warganya yang tinggal di Qatar. Disusul pemerintah Yaman, Maladewa, dan Libya yang berbasis di Timur kemudian mengikutinya juga. Selain itu, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir menutup wilayah udara mereka ke Qatar, dan mengatakan maskapai penerbangan asing harus meminta izin untuk penerbangan ke Qatar dan sebaliknya. Satu-satunya perbatasan darat Qatar juga ditutup oleh Arab Saudi dan kapal-kapal yang mengibarkan bendera Qatar atau yang melayani Qatar dilarang berlabuh di banyak pelabuhan. Dua negara bagian dalam Dewan kerjasama teluk yang beranggotakan enam orang (GCC) tidak memutuskan hubungan dengan Qatar. Kuwait telah menawarkan untuk menengahi perselisihan tersebut. (BBC NEWS, 2017)

Dari krisis diplomatik tersebut Qatar menerima dampak atau sanksi ekonomi di negaranya. Seperti yang sudah diketahui Qatar bergantung pada impor melalui darat dan laut untuk kebutuhan dasar penduduknya sebesar 2,7 juta, dan sekitar 40 % makanannya masuk melalui perbatasan darat dengan Arab Saudi. Awalnya, rak-rak supermarket di Doha dikosongkan dari persediaan dasar karena penduduk bergegas untuk menimbunnya tetapi penimbun cepat berakhir setelah Turki dan Iran mulai mengirim makanan melalui udara dan laut.

Dan dampak lainnya setelah Qatar diboikot oleh beberapa negara, pasar saham Qatar kehilangan sekitar 10% atau sekitar \$ 15 miliar, dalam nilai pasar selama empat minggu pertama krisis. Namun, pasar saham telah pulih 6% dari nilai sebelum krisis. Ekspor gas alam cair juga sejauh ini tidak terpengaruh dan menteri keuangan emirat mengatakan Qatar memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan ekonomi dan mata uangnya. Sementara itu, perusahaan yang mengerjakan proyek stadion dan infrastruktur baru untuk Piala Dunia sepakbola 2022 harus mengamankan sumber baru untuk bahan bangunan. Biaya pengiriman naik sepuluh kali lipat tetapi Qatar telah mulai pengiriman kargo melalui Oman untuk mengatasi perbatasan akses ke pelabuhan di UEA.

Dari paparan diatas, Qatar sebagai anggota GCC bersama Arab Saudi ternyata bersikap yang berbeda pada Ikhwanul Muslimin dibandingkan Arab Saudi dan anggota GCC lain. Penelitian ini difokuskan untuk mengelaborasi alasan mengapa Qatar mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin yang berbeda sikapnya dengan Arab Saudi dan negara anggota GCC yang lain.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian diatas membahas tentang “Alasan dukungan Qatar terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin dalam Arab Spring di Mesir?”

C. Kerangka Teori

Teori Balance Of Power

Balance of Power dalam hubungan internasional adalah kebijakan suatu negara yang melindungi diri terhadap bangsa atau kelompok negara lain dengan menyamakan kekuatannya dengan kekuatan pihak lain. Negara dapat mengupayakan kebijakan keseimbangan kekuasaan dengan dua cara, yaitu

pertama meningkatkan kekuatannya mereka sendiri, seperti ketika terlibat dalam perlombaan persenjataan atau dalam perolehan kompetitif wilayah. Yang kedua dengan menambahkan kekuatan mereka sendiri dari negara lain, seperti ketika memulai kebijakan aliansi. Teori ini mulai digunakan untuk menunjukkan hubungan kekuasaan dalam sistem negara Eropa dari akhir Perang Napoleon hingga Perang Dunia I. (Chegg Study)

Tetapi Balance of Power pada saat ini bersifat bipolar, dan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua negara adidaya dan semua negara lain, negara-negara Eropa kehilangan kebebasan bergerak yang sebelumnya dibuat untuk sistem negara yang fleksibel. Serangkaian aliansi yang bergeser dan pada dasarnya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat melawan satu sama lain, negara-negara Eropa sekarang berkerumun disekitar dua negara adidaya dan cenderung mengubah diri mereka menjadi dua blok yang stabil.

Teori Balance of Power menyatakan bahwa ada penyeimbangan kembali kekuasaan yang berkesinambungan diantara negara dan bangsa. Dengan kata lain, ketika Amerika Serikat meningkatkan kemampuan militernya, negara-negara lain akan menambahkan kemampuan mereka untuk memastikan tidak ada satu negara pun yang memiliki kekuatan absolut (dunia dimana satu negara adalah kekuatan absolut disebut hegemoni).

Pendukung teori Balance of Power berpendapat bahwa beberapa kombinasi mekanisme endemik ke dunia politik menciptakan tekanan untuk pembentukan keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional. Mekanisme seperti itu mungkin terletak pada tingkat individu pengambilan keputusan, seperti kecenderungan manusia untuk mengejar kekuasaan untuk kepentingannya sendiri, atau dalam lingkungan internasional itu sendiri. Meskipun beberapa "sifat manusia" mengerti tentang keseimbangan kekuasaan tetap ada dalam

teori hubungan internasional, mereka menenpati posisi merjinal dalam hal ini dan membutuhkan sedikit elaborasi.

Perspektif Balance Of Power adalah prinsip inti dari teori klasik dan neorealis yang mencoba menjelaskan pembentukan aliansi. Menurut teori neorealis tentang anarkisme sabagi hasil dari sistem internasional, negara-nagera harus mampu menjamin keberlangsungan hidup mereka dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kekuatan diri sendiri. Tanpa adanya otoritas diatas negara, suatu negara dapat mencegah potensi dominasi yang dengan cara memperkuat diri. (T. V. Paul, 2004)

Pengertian umum tentang balance of power telah disempurnakan dan dipersempit menjadi proposisi yang dapat diuji secara empiris. Proposisi ini, ditulis oleh Arthur Lee Burn, Morton A. Kaplan, David Singer, dan Melvin Small. F.H. Hinsley, dan Richard Rosecrance baru-baru ini bergabung dengan sejumlah hipotesis keseimbangan struktural, berasal dari karya Heider, Harary, Taylor, dan lainnya. Para ahli meninjau proposisi ini untuk melihat mana yang paling jelas divalidasi oleh data yang dihasilkan dalam Analisis Situasional. Proposisinya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Semakin dekat aliansi antara dua atau lebih kekuatan
2. Dalam kondisi keseimbangan sistem tenaga “bertindak untuk menentang aktor yang cenderung mengambil posisi dominan
3. Dalam keseimbangan sistem kekuasaan negara bertindak untuk menentang koalisi apa pun yang cenderung mengambil posisi yang dominan
4. Dalam keseimbangan sistem tenaga, menyatakan izin atau hambatan para aktor nasional untuk memasuki kembali sistem sebagai mitra peran yang dapat diterima, atau bertindak untuk membawa beberapa aktor yang sebelumnya tidak penting dalam aktor penting klasifikasi

5. Pembentukan aliansi yang signifikan oleh dua atau lebih aktor dalam suatu sistem internasional yang multipolar, karena hilangnya interaksi peluang, mengarah pada penurunan kerja sama dan peningkatan konflik dalam sistem internasional secara keseluruhan. (Healy & Stein)

Bagi kaum realis, perdamaian dunia akan dapat diperoleh dengan dibentuknya *balance of power*. *Balance of power* atau perimbangan kekuatan merupakan sebuah konsep dimana setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya ataupun menyamakan kekuatannya dengan negara lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya negara yang memiliki kekuatan berlebih atau lebih dominan dibandingkan dengan negara lain. Kaum realis selalu merasa takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh negara lain, sehingga negara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya (Akbar, 2014). Morgenthau juga menjelaskan bahwa inti dari pandangan realis terletak pada signifikansi kepentingan nasional (*national interest*), kekuasaan (*power*), pemerataan kekuasaan (*balance of power*), dan pengaturan kekuasaan dalam dunia anarki. *Balance of power* adalah salah satu teori hubungan internasional yang menekankan pada efektifitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara oleh kekuatan negara-negara lain. Kontrol yang terjadi berupa distribusi kekuatan negara pesaing ataupun aliansi. *Balance of power* memiliki asumsi dasar bahwa ketika sebuah negara yang dominan meningkatkan kekuatannya secara lebih agresif, maka negara-negara kecil yang merasa terancam akan merespon dengan beraliansi dengan negara besar untuk menjaga keamanan negara mereka dari ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh negara yang dominan. Sebagai contoh seperti saat Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara yang berkuasa saat itu terus menyeimbangkan kekuatan mereka dengan meningkatkan kapabilitas militer dan juga membentuk aliansi-aliansi dengan negara-negara lain. *Balance of power* dimaksudkan dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam

struktur internasional. 8 Keteraturan itu dapat terwujud dikarenakan adanya security dilemma yang membuat negara-negara lebih terfokus pada peningkatan kekuatan militer yang mereka miliki sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang negara lain dan akhirnya yang terjadi adalah balance of power. Keteraturan dapat terwujud salah satunya tergantung pada efektifitas balance of power itu sendiri. Balance of power berfungsi efektif jika pertama, sekelompok negara dapat membentuk perseimbangan kekuatan dalam sebuah aliansi. Di dalam aliansi tersebut negara-negara pasti lebih merasa aman dan juga lebih tahu kekuatan masing-masing negara dalam aliansi tersebut. Dalam keadaan yang demikian, proses perseimbangan kekuatan dapat mendorong terciptanya dan terjaganya stabilitas hubungan antar negara yang beraliansi, sebagai contoh banyak dibuatnya kelompok pertahanan dunia. Kedua, dua negara yang berbeda dapat saling melakukan perimbangan kekuatan dengan cara menyesuaikan kekuatan militer masing-masing antara yang satu dengan yang lain. Pemikiran Morgenthau bersumber pada pemikiran bahwa negara merupakan aktor yang sangat esensial perannya, dan bahwa para pengambil keputusan dalam negara bertindak dengan dan atas nama kepentingan nasional untuk memperoleh dan meningkatkan power yang dimilikinya. Morgenthau juga mengatakan bahwa politik dipandang sebagai usaha untuk memperjuangkan kekuasaan (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997, p. 71).

Teori Balance of Power ini cocok diterapkan untuk kasus Qatar yang mendukung Ikhwanul Muslimin dalam kasus Arab Spring di Mesir, yang mana Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin karena memiliki faktor sejarah yang panjang dan juga Qatar ingin menyamakan kekuatannya dengan negara-negara berpengaruh di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan UEA. Qatar sebagai negara kecil di Timur Tengah ingin memiliki pengaruh dan ingin terlihat sebagai negara yang kuat dan dapat sebanding dengan Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang sangat berpengaruh di Timur Tengah, Arab Saudi juga memiliki

sistem negara dimana masih memegang teguh kepada islam tradisional, yang dimana negara-negara Timur Tengah lainnya juga memiliki sistem islam tradisional. Maka dari itu Arab Saudi gampang diterima oleh negara-negara tetangganya karena mempunyai karakteristik yang sama dan ideology islam yang sama. Disini dapat dilihat berbeda dengan Saudi yang dikenal sangat tradisional, Qatar dikenal sebagai salah satu pendukung modernitas. Modernitas tersebut bukan saja diwujudkan dalam pembangunan insfrastruktur maupun kebijakan-kebijakan ekonomi namun juga dalam hal pemikiran. Sejak periode kepemimpinan Hamad Al-Thani, modernitas atau yang kemudian didentikan dengan liberalitas, menjadi jargon utama dalam upaya pembangunan kapasitas negara. Postur internasional yang dibangun oleh Qatar mengedepankan konsep mediasi dimana implikasi nyata yang kemudian diambil adalah keputusan Qatar untuk membuka diri pada berbagai kelompok yang mengalami persekusi, termasuk para pemuka Ikhwanul muslimin.

Kedua negara ini membangun jejaring transnasional mereka di kalangan negara-negara lain dengan cara yang berbeda. Qatar mengambil ideology yang berbeda, yaitu Qatar menjadi jembatan penghubung bagi beberapa tokoh kunci Ikhwanul Muslimin yang mengalami persekusi di negara tempat tinggal mereka, terutama dari Mesir. Robert pernah menulis bahwa langkag Qatar untuk menjadi tuan rumah bagi para tokoh kunci Ikhwanul Muslimin ini menjadi penyeimbang bagi dominasi Islam Wahabi yang didorong oleh Arab Saudi. Selain jejaring local transnasional yang dibangun dari ideology islam tersebut, Qatar juga menggunakan soft power mereka untuk membentuk jejaring mereka di Timur Tengah. Strategi tersebut sejalan dengan ide modernitas yang diusung oleh pemerintah Qatar. Sanroma juga menjelaskan secara detail strategi yang diambil oleh Qatar di berbagai bidang dan bagaimana Qatar mampu menerjemahkan strategi tersebut untuk mendukung ambisi regional dan internsional mereka. Qatar dengan upaya menyamakan kekuatannya dengan Arab

Saudi buktinya tidak terlalu kuat karena jejaring Islam-Wahabi yang dibangun Saudi membentang bukan hanya di Timur Tengah namun juga di kawasan lain, sedangkan jejaring Qatar lebih luas dalam area kerja. Karena dibangun dengan basis ideology yang kuat dan sokongan dana yang cenderung mapan, jejaring Saudi lebih memiliki keterikatan patron-klien yang jelas jika dibandingkan jejaring yang dibangun oleh Qatar. Disisi lain, pengeluaran Qatar dalam membangun jejaring local transnasionalnya pun tidak terbangun dengan tegas keran luasnya sasaran benganan jejaringnya.

D. Hipotesa

Dari khusus dan penjelasan diatas, peneliti memiliki argumentasi utama bahwa alasan utama mengapa Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin pada masa Arab Spring di Mesir adalah sebagai berikut:

- a. Jika dilihat lebih dalam hubungan Qatar dan Ikhwanul Muslimin memiliki sejarah yang sangat panjang, bukan hanya sekedar real politik, namun Ikhwanul Muslimin memiliki jasa dan hubungan yang sangat dekat untuk perkembangan pendidikan di Qatar.
- b. Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin ini juga merupakan keinginan Qatar untuk memperbesar pengaruhnya di Timur Tengah dan ingin menunjukkan rezim monarki yang terbuka terhadap perubahan politik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang hubungan Qatar dan Ikhwanul Muslimin bukan hanya sekedar realpolitik, namun adanya sejarah yang panjang natara keduanya

2. Menjelaskan alasan dukungan Qatar terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin pada krisis Arab Spring di Mesir dan negara yang berdampak krisis Arab Spring ini
3. Penelitian ini juga ingin mengetahui dampak apa yang terjadi pada Qatar setelah memiliki kebijakan yang berbeda dari negara anggota GCC yang lain
4. Lalu pengaruh apa saja yang terjadi di Qatar setelah negaranya diboikot oleh Arab Saudi, UEA, dan anggota GCC yang lain

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Bidang mata kuliah Hubungan Internasional dapat mengembangkan study kasus tentang Qatar dan kelompok Ikhwanul Muslimin.
2. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk mengetahui mengapa Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin.
3. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk mempelajari bagaimana cara berdiplomasi dengan adanya masalah ini, dan bagaimana cara mendapatkan jalan keluar dari konflik tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan *who* dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

H. Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan teknik kualitatif yang penelitian tentang riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

I. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki jangkauan batasan dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan penulis guna untuk memfokuskan penelitian agar tidak melebar ke dalam kasus yang lain. Penelitian ini hanya berfokus kepada perbandingan ideologi Qatar dan Arab Saudi, dan juga fokus

dalam kasus Qatar yang mendukung ikhwanul muslimin yang notabene berbeda ideologi dengan Qatar sendiri.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan mengenai alasan Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin dalam krisis hubungan diplomatik Qatar – Arab Saudi tahun 2011-2017 ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I, pada bab ini terdapat pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, bab ini fokus menjelaskan tentang perkembangan dan persebaran Ikhwanul Muslimin di kawasan Timur Tengah

BAB III, dalam bab ini akan menjelaskan sejarah dan keterikatan hubungan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin

BAB IV, bab ke IV ini menjelaskan tentang dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin dalam krisis Arab Spring di Mesir.

BAB V, bab ini akan menjelaskan kesimpulan, yang mana berisi tentang reaksi Arab Saudi, UEA, dan negara GCC yang lain menyikapi sikap Qatar yang pro terhadap Ikhwanul Muslimin pada masa Arab Spring.